LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MEI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 10 Juni 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 37,88 %

b. Keuangan = 7.957.415.363 (35,57%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000			15.380.000		
1	Sosialisasi Perpajakan, Peraturan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan	50.000.000	64,80	62,53	15.380.000	(2,27)	anggaran perjadin belum dianggarkan untuk bulan mei
Administrasi Umum Perangkat Daerah							

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.200.000			500.000		
1	Pelayanan Informasi	36.200.000	3,80	1,40	500.000	(2,40)	belum ada permintaan publikasi dari majalah Media Korpri
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.800.000			5.443.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000	27,53	5,99	5.443.000	(21,54)	Menyesuiakan kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	28.670.000			10.170.000		
1	Roadshow PUG bagi OPD Provinsi	28.670.000	100	65,68	10.170.000	(34,32)	OPD Sasaran Roadshow PUG meminta reschedule karena masing-masing OPD banyak kegiatan di bulan Mei
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	12.195.000			0		
1	Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG bagi SDM Evaluator	12.195.000	12,75	0	0	(12,75)	Anggaran bulan ini hanya SPJ ATK.
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.731.000			59.502.000		
1	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	249.731.000	28,39	23,83	59.502.000	(4,56)	menyesuaikan jadwal BKOW
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	85.344.000			31.989.240		
1	Pelaksanaan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)	85.344.000	41,65	37,48	31.989.240	(4,17)	satu tenaga non ASN resign
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	17.200.000			6.100.000		
1	Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA	17.200.000	58,72	35,47	6.100.000	(23,25)	karena jadwal verifikasi KLA diundur, maka jadwal rapat koordinasi diundur, menunggu bimtek verifikasi administrasi dari kementerian di bulan juni
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	58.844.000			32.700.300		
1	Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB	58.844.000	57,73	55,56	32.700.300	(2,17)	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	44.347.000			591.000		

1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA	44.347.000	6,88	1,33	591.000	(5,55)	Menyesuaikan kebutuhan (perjadin)
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	10	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan KB MKJP diperuntukkan hanya untuk pimpinan komisi E (KB)
2. Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan atas pertimbangan BKKBN (KIE)
3. keterbatasan anggaran untuk penyusunan GDPK 5 pilar (Dalduk)
4. Kampung KB yang sinergi DRPPA masih terbatas karena keterbatasan anggaran di provinsi dan kab/kota (Dalduk)
5. Capaian kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan masih belum memenuhi target (Dalduk)
6. Perubahan metode analisis gender pada kegiatan Roadshow PUG (KG)
7. Penyusunan RAD KLA terkendala jadwal tim penyusun (PA)
8. Antara Perpres dan Permen terdapat perbedaan format (pencantuman anggaran di lampiran RAD) (PA)
9. Ada keterlambatan dalam progress rehab UPTD PPA (UPTD)

Upaya

1. Koordinasi dengan BKKBN (KIE)
2. Koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan di Komisi E (KB)
3. Bekerjasama dengan BKKBN untuk dapat mencapai kampung KB mandiri dan berkelanjutan sesuai target (Dalduk)
4. Dikerjasamakan dengan stakeholder terkait (Dalduk)
5. Merubah metode analisis gender (KG)
6. Koordinasi intens dengan tim penyusun (PA)
7. Kesepakatan antara tim penyusun dan OPD terkait dalam penyesuaian format (PA)
8. Mengadakan rapat pembuktian (Show Cause Meeting-SCM) untuk melihat permasalahan dan merencanakan upaya penyelesaian masalah terkait progress rehab gedung UPTD PPA.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Penyerahan hadiah di Jepara (KIE)
2. Harganas di Jepara dan Banyumas (KIE)
3. Safari Pelayanan KB (KB)
4. Sosialisasi peningkatan pelayanan KB MKJP (KB)
5. Workshop Advokasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota (Dalduk)
6. Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung KB (Dalduk)
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UK)
8. Pemeliharaan Gedung kantor induk (UK)
9. Assesment kebutuhan alat pelatihan kelompok UPPKA di Desa Sukomakmur (KS)
10. Roadshow PUG di 2 titik (KG)
11. PPEP (KG)
12. Dikpol (KG)
13. Pelatihan manajemen kasus (dana DAK) dengan peserta 5 kab. yg sudah membentuk UPTD PPA (PA)
14. FGD Pembahasan Kebijakan Perlindungan Anak tahap ke-3 di Semarang (PA)
15. Layanan Rutin UPTD PPA
16. Rapat Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA di Semarang (PHA)
17. Rakor puspaga (PHA)
18. Ngopi penak (PHA)
19. Pertemuan Koordinasi PPT tingkat Provinsi (PP)
20. Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Layanan di kab/kota di kab. Semarang, kab. Tegal, kota Tegal, kab. Pemalang, kab. Pati (PP)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Mei 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin, 10 Juni 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 19681124199310200 1